

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : FITRY OETARY
NPM 1605170358
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL. Kaptan Hlukht9r Basri to. 3 (OGI) GG24567 hledan 20t38

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 24 April 2021, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : RITRY OETARY
NPM : 1605170358
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA LANGSA TAHUN 2015-2019
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(ZULIAHANUM, S.E., M.Si)

PENGUJI II

(M. SHAREZA ALIFIZ, S.E., M.Acc)

Pembimbing

(SUKMA LESMANA, SE., M. Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(IL JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

Prof. DR. ADE GUNAWAN, SE., M.Si



UM S U

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS AIUBAMMADIYAB SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muklitar Basri No. 3 (061) 6624567 Medau 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Lengkap FITRY OETARY
W 1605170358
m Stntli AKIFNTANSI
tr>si AKUNTANSI SEKFOR PUBLIK
SKripsi : PENGARHB PENDAPATW ASLI DAERAef DAN
DANA ALOKASI UMUM TER fADAP BELANJA
DAERAH PADA KOTA LANGSA

B zsjai daa telab aieaezsaBi pezsyzataa aatak éiajotcaa dalaaj ujian
pertahankan skriJni.

Medau, November 2020

Pembimbing Skripsi

(SHKMA LESMANA, SE, JYksi)

ketua Program Studi Akuntansi
F"ahultas Ekoaoonii dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dehan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitriy Oetary
NPM : 1605170358
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Pembimbing : Sukma Lesmana, SE, M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa

No	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
1	Dilatar belakang masalah setelah tabel 1.1 wajib ada hasil penelitian terdahulu membuktikan DAU dan PAD mempengaruhi belanja daerah.	12/08-2020	
2	Gambar 2.1 harus jelas yang mana menunjukkan hipotesis penelitian	03/09-2020	
3	- Teknik Pengumpulan data dokumentasi saja. - Teknik analisis data dijelaskan Paraf software statistik versi ber referensi 3 dosen akuntansi u sebelumnya	" - 2020	
4	- 4.1 Hasil Penelitian berisi Penjelasan hasil uji statistik. - 4.2 Pembahasan berisi membahas hasil Penelitian dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu serta menjawab rumusan masalah - Perbaiki Penulisan	28/10-2020	
5	- Perjelas kesimpulan dan saran - Menambahkan referensi Pembimbing dikutip dalam penelitian bisnis dan daftar Pustaka	1-2020	
6	- Iki Penulisan	20/11-2020	
7	acc sidang meja hijau		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Fitriy Oetary, SE, M.Si

Medan, November 2020
Dosen Pembimbing

(Sukma Lesmana, SE, M.Si)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitry Oetary
NPM : 1605170358
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2015-2019

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data perusahaan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari data-data yang sah yang ada di perusahaan tempat saya melaksanakan riset.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Juni 2021
Saya yang menyatakan



Fitry Oetary

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2015-2019**

**Fitry Oetary
1605170358**

Email: fitry.oetary98@gmail.com
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Jenis data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kota Langsa yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Langsa. Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tahun 2015 sampai 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dengan dibantu software SPSS 22.0. Dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu : variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kota Langsa. (2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kota Langsa. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aloksi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah.*

**THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND GENERAL
ALLOCATION FUNDS ON REGIONAL EXPENDITURES OF LANGSA CITY
YEAR 2015-2019**

**Fitry Oetary
1605170358**

Email: fitry.oetary98@gmail.com

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of North Sumatra

Abstract

This study aims to determine the effect of Regional Original Income and General Allocation Funds on Regional Expenditures in Langsa City. The type of research used is quantitative. The type of data analyzed in this paper is secondary data with the census method sourced from the Langsa City Budget Realization Report document obtained from the Regional Financial Management Agency Office in Langsa City. From this APBD Realization Report, data is obtained regarding the realization of Regional Expenditures, Regional Original Income and General Allocation Funds from 2015 to 2019. The data collection technique used is documentation. The data analysis technique used descriptive statistical methods with the help of SPSS 22.0 software. In this study, the research variables were classified into two groups, namely: the independent variable and the dependent variable. The independent variables in this study are Regional Original Income and General Allocation Funds. While the dependent variable is Regional Expenditure. The results of the study show that: (1) Regional Original Income has no and no significant effect on regional spending in Langsa City. (2) The General Allocation Fund has no and no significant effect on regional spending in Langsa City. (3) Regional Original Income and General Allocation Funds have no and insignificant effect on Regional Expenditures in Langsa City.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Regional Expenditure.*

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu :**“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Langsa Tahun 2015-2019.”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda Yusman S dan ibunda tercinta saya Sutartik yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh

keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spitutorial kepada penulis serta kasih sayangnnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing akademik selama peneliti berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
6. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Roni Parlindungan Sipahutar S.E., M.M selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Kepada abang saya Heru Setiawan, adik-adik saya Dewi Sartika, Indah Putri Dwiyanti, Aurellia Fica Azzahra dan Shifa Suciana Nabila yang turut

membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

10. Kepada Rekan saya Agung Satrio, S.K.M. dan sahabat-sahabat Eriska Ayu Utari, Dini Aprillia, S.Ak, Devita Desriani, S.Ak, Eliza Rossa, Addina Fitriyani, S.M, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumaera Utara.
11. Kepada teman- teman peneliti yang ada di kelas G Akuntansi Pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2016.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, September 2020

Penulis

FITRY OETARY
NPM:1605170358

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Uraian Teori	9
2.1.1 Anggaran Pendapatan Belanja.....	9
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.3 Dana Alokasi Umum	18
2.2 Kerangka Berfikir Konseptual	24
2.3 Hipotesis.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Defenisi Operasional Variabel	28
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Deskripsi Data	37
4.1.2 Analisis Data.....	41
4.1.2.1 Uji Statistik Deskriptif	41
4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik	41
4.1.2.3 Pengujian Hipotesis.....	45

4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah	50
4.2.2 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah.....	52
4.2.3 Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah.....	53

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	5
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	29
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1 Belanja Daerah Kota Langsa Periode 2015-2019	38
Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Periode 2015-2019	39
Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum Kota Langsa Periode 2015-2019.....	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel 4.7 Hasil Uji t	46
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	42
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
Gambar 4.3 Kriteria Pengujian Uji t	46
Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Uji t	47
Gambar 4.5 Kurva Uji F.....	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah di Indonesia sekarang ini sedang melewati pertumbuhan yang cukup cepat, seiring dengan perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di setiap daerah memiliki wilayah otoritasnya masing-masing yang diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Peran otonomi daerah antara lain untuk pemberdayaan dan pengoptimalkan potensi setiap daerah. Dengan begitu tercapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Saputri, Marissa Ayu & Muid, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah wewenang Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut diatas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonomi dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut (Mirani, Tumiwa, A.M.Koleangan, Rosalina, O. Niode, 2016).

Belanja Daerah menurut Jati (2020) adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja atau pengeluaran merupakan

pengeluaran kas daerah yang dilakukan secara teratur oleh pemerintah daerah guna membiayai kegiatan operasi dalam pemerintahan dan selanjutnya akan dilaporkan dalam APBD. Meningkatnya pengeluaran belanja daerah harus seimbang dengan dana yang diperoleh supaya dapat memenuhi keperluan yang dibutuhkan. Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada setiap daerah menjadi meningkat dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal. Kaitannya dengan kegiatan belanja pemerintah daerah tersebut, terdapat dua sumber utama yang dapat membiayai yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Dana alokasi umum menurut Jati (2020) adalah dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada setiap daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan dalam memenuhi kebutuhan agar dapat mewujudkan pelaksanaan desentralisasi dan penulis menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya yang tinggi akan menyebabkan daerah tersebut memiliki kebebasan dalam menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Menurut Jati (2020) dua sumber pendapatan tersebut memiliki jumlah cukup besar, sehingga dari kedua sumber utama tersebut memiliki peran penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah diberi batasan-batasan yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan dan ditujukan kepada siapa sehingga diharapkan dengan memahami aturan ini para pelaksana pengawasan keuangan daerah terutama tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. Peraturan Pemerintah

No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.” Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan pada “pesanan proyek tertentu” dalam merencanakan anggaran. (Elizar Sinambela & Eka Nurmala Sari, 2018)

Pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal

dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang berada di Wilayah Barat Indonesia. Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus yang dikarenakan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Aceh yang membawahi beberapa kabupaten kota di Aceh memiliki kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan daerah yang menangani terkait kebijakan di daerah.

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang berada di Wilayah Provinsi Aceh. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner dan kota wisata. Pada awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Disamping potensi laut, Kota Langsa juga memiliki potensi di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga secara Pendapatan Asli Daerah untuk menopang APBD di wilayah ini perlu ditingkatkan lagi, namun demikian, perlu adanya perhatian khusus terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk melanjutkan kesinambungan.

Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintahan Kota Langsa tahun 2015-2019

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2015	PAD	114.529.994.341,00	109.116.860.676,13	95,27%
		DAU	425.446.753.000,00	425.446.753.000,00	100%
		Belanja Daerah	870.341.493.208,69	788.712.999.182,33	90,62%
2	2016	PAD	133.420.175.265,00	107.524.781.242,30	80,59%
		DAU	451.951.928.000,00	451.951.928.000,00	100%
		Belanja Daerah	1.109.385.445.250,31	973.985.827.841,00	87,80%
3	2017	PAD	127.325.504.605,00	120.138.956.032,87	94,36%
		DAU	444.012.586.000,00	444.012.586.000,00	100%
		Belanja Daerah	1.055.478.816.642,96	1.021.681.327.934,35	96,80%
4	2018	PAD	125.634.683.815,00	121.316.713.328,93	96,56%
		DAU	444.012.586.000,00	444.012.586.000,00	100%
		Belanja Daerah	685.403.982.427,00	792.041.640.361,25	115,56%
5	2019	PAD	153.718.784.258,00	115.224.246.710,49	74,97%
		DAU	456.700.561.000,00	456.700.561.000,00	100%
		Belanja Daerah	995.312.627.413,88	930.309.326.664,95	93,47%

Sumber: Kantor BPKD Kota Langsa

Berdasarkan tabel 1.1 jika dilihat dari data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 hingga 2019 tidak habis digunakan, dimana lebih tingginya anggaran daripada realisasi yang dipergunakan. Dilihat dari data Dana Alokasi Umum pada tahun 2015 hingga 2019 selalu memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Dapat diartikan bahwa di Kota Langsa memiliki kemampuan pemerataan keuangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada data Belanja Daerah pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 tidak habis digunakan, dimana lebih besar anggaran daripada realisasi yang dipergunakan. Sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa anggaran belum terpenuhi, dimana lebih tingginya realisasi daripada anggaran

yang telah dianggarkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa kurang efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Jolianis (2014) mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menghasilkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Apriliawati, Kiki Ninda & Handayani (2016) mengenai Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan semakin tinggi DAU yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dan telah terjadi *flypaper effect* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berarti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya hal ini dibuktikan dengan penggunaan Dana Alokasi Umum yang lebih dominan daripada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kota Langsa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Langsa tidak selalu mencapai target atau anggaran yang telah dianggarkan, yaitu pada tahun 2015,2016,2017 dan 2019.
2. Pendapatan Asli Daerah tidak selalu memenuhi kebutuhan belanja daerah, yaitu pada tahun 2016 hingga 2019.
3. Dana Alokasi umum masih menjadi sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah Kota Langsa untuk mencukupi kebutuhan belanja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa ?
2. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum terdapat Belanja Daerah pada Kota Langsa ?
3. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini telah memperdalam wawasan penulis mengenai objek yang diteliti mengenai komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta Belanja Daerah yang menjadi hubungan pengaruh diantara keduanya.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah kota Langsa untuk melihat efektivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber dana untuk digunakan membiayai aktivitas pemerintah Kota Langsa dalam penyusunan APBD.

3. Bagi Bidang Akuntansi

Sebagai bahan masukan mengenai naik atau turunnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta Belanja Daerah.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah setiap tahunnya. Dalam pasal 79 disebutkan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Salah satu bentuk dari anggaran organisasi sektor publik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun salah satu fungsi dari APBD yaitu untuk menjadi dasar dalam merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Karena jika tidak dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Sedangkan menurut Pilat, Juddy Julian & Morasa (2017), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah

selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitas. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva/penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva/pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi ekuitas pemerintah daerah.

b. Belanja Daerah

Menurut IASC Framework, penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar/depleksi asset/terjadinya utang yang mengalokasikan

berkurangnya ekuitas dana. Menurut Sinambela, Elizar & Rizki Ana Pohan (2016) definisi atau pengertian Belanja Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

c. **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimasukkan untuk menutupi defisit anggaran/sebagai alokasi surplus anggaran adanya pos pembiayaan merupakan upaya APBD makin inovatif.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, 2014)

Menurut Ferdian (2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwaju dan asas desentralisasi.

Dapat disimpulkan PAD adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. PAD merupakan sumber keruangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya.

Kenaikan dari jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu menurut Ferdian (2013) sistem pengelolaan PAD perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diharapkan tercapainya efisiensi dan efektivitas yang tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan social ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor/impor.

4. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang diterapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak yang dikelola daerah ada dua jenis:

a) Pajak provinsi, terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan, dan
5. Pajak rokok

b) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir

8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walis
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah ada tiga, yaitu :

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Retribusi perizinan usaha adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi ialah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana hal ini yang termasuk didalamnya ialah hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup :

1. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Jasa giro
4. Bunga deposito
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi

9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas social dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
13. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

4. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Permandagri Nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan menggunakan rumusan

:

$$\mathbf{PAD = PD + RD + HPKDP + LPADS}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

HPKDP = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPADS = Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.3 Dana Alokasi Umum

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana

yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (UU No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum seluruhnya dikelola penggunaannya oleh kepala daerah dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan publik kepada seluruh warga di daerah itu sendiri, maka dari itu dana alokasi umum ini memiliki sifat *block grant* (Saputri, Marissa Ayu & Muid, 2019). Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Ubar Harahap (2011) menyatakan bahwa pemberian DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBD dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Nurfajri & Faisal, 2016):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (Bambang Prakoso, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dihitung dengan menggunakan rumusan :

$$\mathbf{DAU = AD + CF}$$

Keterangan :

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Dimana,

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Keb. Fiskal = Total Belanja

Kap = PAD + DBH Pajak + DBH SDA

AD = Alokasi Dasar

Alokasi Dasar = $90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{bobot Kapupaten/Kota}$ atau, gaji PNSD termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ke-13 dan gaji CPNSD

2.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Sementara itu menurut Ferdian (2013) mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

Berdasarkan Pemandagri No. 21 Tahun 2011 memberikan definisi belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih. Pengelompokkan belanja menurut Pemandagri No 21

Tahun 2011 ini terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung ini meliputi :

- a. Belanja pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan social
- f. Belanja bagi hasil
- g. Bantuan keuangan
- h. Belanja tidak terduga

2) Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

- a. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belanja ini merupakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan

pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Belanja barang dan jasa tersebut berupa belanja barang pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau penggandaan, sewa ruma/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

- c. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai asset tetap berwujud tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan atau pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah dihitung dengan menggunakan rumusan :

$$\mathbf{BD = BTL + BL}$$

Keterangan :

BD = Belanja Daerah

BTL = Belanja Tidak Langsung

BL = Belanja Langsung

2.2 Kerangka Berfikir Konseptual

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Dana Alokasi Umum berasal dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah. selain itu juga pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri akan mempengaruhi belanja daerah. Dengan demikian semakin besar dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mampu membiayai belanja daerah.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Sumber Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah mengacu pada pendapatan daerah berasal dari sumber yang dimiliki oleh dan terletak diwilayah tersebut dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Menurut beberapa penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digunakan suatu daerah untuk memenuhi belanja kebutuhan daerahnya. Dengan semakin banyaknya PAD maka tingkat kemandirian suatu daerah akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat rendah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Liando dan Hermanto (2017) dan Maimunah (2006) yang membuktikan bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah terutama untuk pembangunan. Oleh karena itu semakin tinggi sumber PAD maka akan semakin besar anggaran belanja yang dikeluarkan.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan atau memberikan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, dana alokasi umum menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja.

Pengaruh dana alokasi umum dengan belanja daerah yaitu semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah. Dana alokasi umum dapat memiliki pengaruh signifikan

dikarenakan dana alokasi umum merupakan dana transfer pemerintah yang paling besar yang diperoleh masing-masing daerah di Indonesia, bahkan besaran dananya pun dapat melebihi pendapatan asli daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah dana yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi pendapatan daerah yang ada.

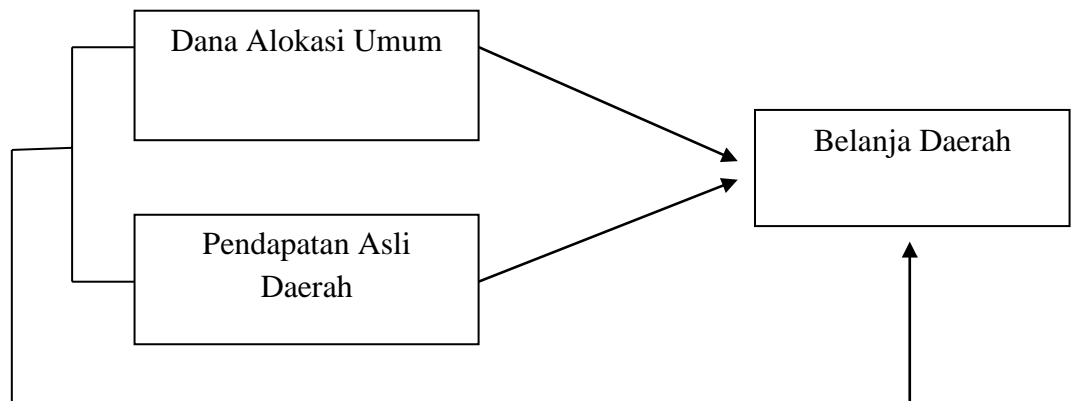
Penjelasan tentang pengaruh dana alokasi umum dengan belanja daerah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sujono (2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah pernah dilakukan antara lain oleh Kusumadewi, Diah Ayu & Rahman (2007). Dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah tersebut disebut dengan tax-spend hypothesis. Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima.

Namun disisi lain, transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah. Kusumadewi, Diah Ayu & Rahman (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel municipalities di Itali dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap

belanja daerah. Kebijakan-kebijakan belanja daerah jangka pendek yang dibuat pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa
2. Ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa
3. Ada pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis yang memusatkan perhatian pada perhitungan nilai yang ditunjukkan dengan nilai berupa angka dari suatu hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu :

1. Variabel Independent (X)

Pengertian variabel independent (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat).

Karena itu yang menjadi variabel independent atau variabel bebas X1 dan X2 pada penelitian ini adalah “Dana Alokasi Umum” dan “Pendapatan Asli Daerah” maka indikator yang digunakan untuk menghitung kedua variabel bebas tersebut masing-masing sebagai berikut :

1) Dana Alokasi Umum (X1)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU Nomor 33 Tahun 2004)

2) Pendapatan Asli Daerah (X2)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU Nomor 32 Tahun 2004)

2. Variabel Dependent (Y)

Variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Karena itu yang menjadi variabel dependent atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah “Belanja Daerah”. Indikator yang digunakan adalah total dari Belanja Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 32 Tahun 2004).

Secara lebih jelas gambaran kedua variabel tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Table 3.1

Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Defenisi	Indikator Penelitian	Skala Penelitian
Independen Pendapatan Asli Daerah (Variabel X1)	Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil	“Dana yang bersumber dari pendapatan APBD atau pemerintah daerah”	Skala Rasio

	<p>pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Ferdian, 2013).</p>		
<p>Independen Dana Alokasi Umum (Variabel X2)</p>	<p>Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendalami kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU Nomor 33 Tahun 2004)</p>	<p>“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau pemerintah pusat”</p>	<p>Skala Rasio</p>
<p>Dependen Belanja Daerah (Y)</p>	<p>Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Ferdian, 2013).</p>	<p>“Belanja Daerah yang bersumber dari seluruh pendapatan daerah”</p>	<p>Skala Rasio</p>

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kali ini yaitu pada Pemerintahan Kota Langsa, pada tahun 2015 sampai 2019. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2020.

Table 3.2 Waktu Penelitian

No	Uraian	WaktuPenyelesaian				
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Penelitian Pendahuluan					
2	Penyusunan Proposal					
3	Bimbingan Proposal					
4	Seminar Proposal					
5	Penyempurnaan Proposal					
6	Penyusunan Skripsi					
7	Bimbingan Skripsi					
8	Sidang Meja Hijau					

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari objek yang diteliti dengan memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Langsa. Penelitian ini dilakukan pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai 2019, berdasarkan ketersediaan data yang diberikan pihak BPKD.

Sedangkan sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Saputri, Marissa Ayu & Muid, 2019). Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tersebut, jadi populasi ini merupakan sampel penelitian. Data yang dianalisis dalam penulisan ini

adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kota Langsa yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Langsa. Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tahun 2015 sampai 2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis yang akan dirumuskan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tergantung pada penulisan yang digunakan masing-masing peneliti (Ikhsan et al., 2014).

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu studi pustaka dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia pada lembaga tertentu baik berupa literatur, jurnal harian, maupun laporan kegiatan ilmiah dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Maka teknik analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dengan dibantu *software SPSS 22.0*, berikut adalah teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti :

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif juga digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik penelitian yang menjadi fokus utama

(Sugiyono, 2016). Ukuran yang digunakan dalam statistic deskriptif antara lain : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standart dan varian) dan koefisien kolerasi antara variabel penelitian. Uji statistik tersebut dapat dilakukan menggunakan program SPSS 22.0.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak(Kuncoro Mudrajad, 2011). Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan membandingkan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi normal. Data normal memiliki bentuk seperti lonceng. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorovsmirnov. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut :

- (1) Jika $p < 0.05$ maka distribusi data tidak normal
- (2) Jika $p > 0.05$ maka distribusi data normal

b. Uji Multikolinieritas

Multikolonieritas adalah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro Mudrajad, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antata variabel independen. Jika variabel

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari melihat nilai tolerance dibawah 1.10 maka terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t (saat ini) dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. (Sugiyono, 2016)

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis untuk penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, yaitu metode yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan berikut ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Belanja Daerah
 a : Nilai *intercept* atau konstanta
 b1-b3 : Koefisien regresi
 X1 : Pendapatan Asli Daerah
 X2 : Dana Alokasi Umum
 e : *Error*

a. Uji Nilai t (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Putri & Gunawan, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan :

- 1.) Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel
 Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima.
- 2.) Dengan melihat nilai probabilitas signifikan Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

b. Uji Nilai F (Uji Simultan)

Dalam penelitian ini, uji nilai F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai sig $< 0,05$ maka variabel dependen secara simultan dipengaruhi oleh variabel independen.

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memberikan gambaran bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Putri & Gunawan, 2018).

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu : variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Daerah.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Langsa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Berikut ini adalah data laporan keuangan Kota Langsa 2015-2019 yang berhubungan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dalam undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di danai dari atas beban APBN

(Undang-Undang RI, 2004). Berdasarkan uji statistik deskriptif nilai belanja daerah minimum atau rendah sebesar Rp 685.403.982.427,00 yang terjadi pada tahun 2018. Sedangkan belanja daerah maksimum atau terendah mencapai Rp1.109.385.445.250,31 yang terjadi pada tahun 2016. Sedangkan rata-rata belanja daerah senilai Rp 943.184.472.988,5680 dengan standar deviasi sebesar Rp 169.342.115.478,31403.

Berikut adalah data Belanja Daerah pada Kota Langsa periode 2015-2019 :

Tabel 4.1 Belanja Daerah Kota Langsa Periode 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2015	114.529.994.341,00	109.116.860.676,13	90,62%
2016	1.109.385.445.250,31	973.985.827.841,00	87,80%
2017	1.055.478.816.642,96	1.021.681.327.934,35	96,80%
2018	685.403.982.427,00	792.041.640.361,25	115,56%
2019	995.312.627.413,88	930.309.326.664,95	93,47%

Sumber: Kantor BPKD Kota Langsa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Langsa mencapai presentase sebesar 90,62%, pada tahun 2016 mencapai 87,80%, pada tahun 2017 mencapai 96,80%, pada tahun 2018 mencapai 115,56%, dan pada tahun 2019 mencapai 93,47%.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (UU No 33 Tahun 2004 pasal 1). Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan uji statistik deskriptif nilai PAD minimum atau terendah sebesar Rp 114.529.994.341,00 yang terjadi pada tahun 2015. Sedangkan PAD maksimum atau tertinggi mencapai Rp 153.718.784.258,00 yang terjadi pada tahun 2019. Sedangkan rata-rata senilai Rp 130.925.828.456,8000 dengan standar deviasi sebesar Rp 14.452.703.207,06609.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah pada Kota Langsa periode 2015-2019 :

Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Periode 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2015	114.529.994.341,00	109.116.860.676,13	95,27%
2016	133.420.175.265,00	107.524.781.242,30	80,59%
2017	127.325.504.605,00	120.138.956.032,87	94,36%
2018	125.634.683.815,00	121.316.713.328,93	96,56%
2019	153.718.784.258,00	115.224.246.710,49	74,97%

Sumber: Kantor BPKD Kota Langsa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Langsa mencapai presentase sebesar 95,27%, pada tahun 2016 sebesar 80,59%, pada tahun 2017 mencapai 94,36%, pada tahun 2018 mencapai 96,56%, dan pada tahun 2019 sebesar 74,97%.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan aturan yang ada DAU ditetapkan minimal 26% dari penerimaan dalam negeri. Distribusinya adalah 10% untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000). Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif nilai Dana Alokasi Umum minimum atau terendah sebesar Rp 425.446.753,00 yang terjadi pada tahun 2015. Sedangkan Dana Alokasi Umum maksimum atau tertinggi mencapai Rp456.700.561,00 yang terjadi pada tahun 2019. Sedangkan rata-rata Dana Alokasi Umum sebesar Rp 444.424.882,800 dengan standar deviasi sebesar Rp 11.914.886.410,71566.

Berikut adalah data Dana Alokasi Umum pada Kota Langsa periode 2015-2019:

Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum Kota Langsa Periode 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2015	425.446.753.000,00	425.446.753.000,00	100%
2016	451.951.928.000,00	451.951.928.000,00	100%
2017	444.012.586.000,00	444.012.586.000,00	100%
2018	444.012.586.000,00	444.012.586.000,00	100%
2019	456.700.561.000,00	456.700.561.000,00	100%

Sumber: Kantor BPKD Kota Langsa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 hingga 2019 Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Langsa persentase sebesar 100%.

4.1.2 Analisis Data

4.1.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif juga digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik penelitian yang menjadi fokus utama. Ukuran yang digunakan dalam statistic deskriptif antara lain : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dipersi (devisiasi standart dan varian) dan koefisien kolerasi antara variabel penelitian.

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	114529994341.00	153718784258.00	130925828456.8000	14452703207.06609
DAU	5	425446753000.00	456700561000.00	444424882800.0000	11914886410.71566
Belanja Daerah	5	685403982427.00	1109385445250.31	943184472988.5680	169342115478.31403
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data diolah SPSS Versi 22.0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa uji statistik deskriptif nilai belanja daerah minimum atau rendah sebesar Rp 685.403.982.427,00 yang terjadi pada tahun 2018. Sedangkan belanja daerah maksimum atau terendah mencapai Rp1.109.385.445.250,31 yang terjadi pada tahun 2016. Sedangkan rata-rata belanja daerah senilai Rp 943.184.472.988,5680 dengan standar deviasi sebesar Rp 169.342.115.478,31403.

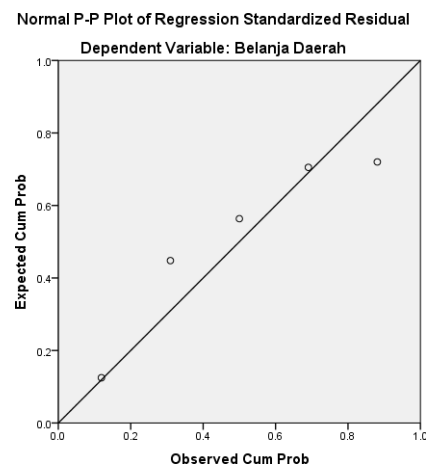
4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala linear atau uji asumsi klasik. Tujuan dilakukan uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai

distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan *mean* dan standar deviasi yang sama. Jadi asumsi klasik pada dasarnya memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dalam sebuah model regresi yaitu variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi secara normal atau tidak.



Sumber: Data diolah SPSS Versi 22.0

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal p-plot terlihat pada gambar diatas bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel

independent (bebas).model regresi yang baik seharusnya bebas multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antara variable independen (bebas). Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) yang tidak melebihi 10.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan uji multikolonieritas pada data yang telah diolah, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	,207	4,832
	DAU	,207	4,832

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah SPSS Versi 22.0

Dari tabel dapat dilihat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki tolerance sebesar $0,207 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $4,832 < 10$. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai tolerance sebesar $0,207 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $4,832 < 10$. Dari masing-masing variabel memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-Watson. Bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat autokorelasi antara error yang

terjadi antar periode yang diujikan dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji D-W.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokoterasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.414 ^a	.172	-.656	217944592023 .66140	2.041

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

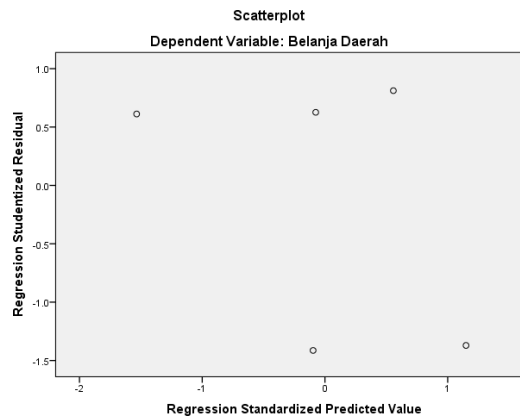
Sumber Data diolah SPSS 22.0

Nilai DW sebesar 2,041 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 5 (n) dan jumlah variabel independent 2 (k=2). Nilai DW 2,041 lebih besar dari batas atas (du) 1.71 dan kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H0 yang menyatakan tidak ada autokolerasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokolerasi.

4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada atau tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian *error term* untuk model regresi.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode *chart* (Diagram *Scatterplot*).



Sumber : Data diolah SPSS Versi 22.0

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta membentuk datu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa ada uji regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.2.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen. Alasan lain uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara parsial atau indivisual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variable terikat (Y).

Table 4.7 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1350536240636.217	7072177332055.831		-.191	,866
	PAD	.902	16.574	,077	.054	,962
	DAU	4.895	20.104	,344	.243	,830

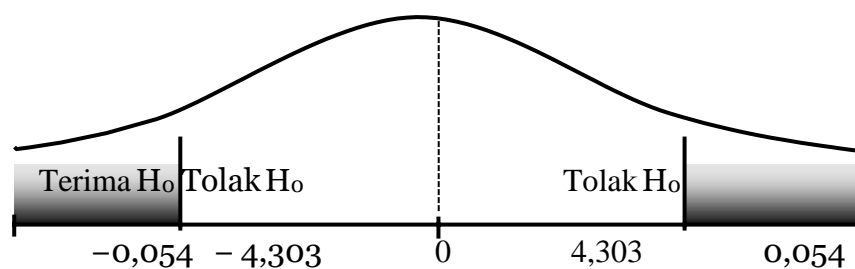
a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data diolah SPSS versi 22.0

Hasil pengujian statistic t pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai t untuk $n = 5 - 2 = 3$ adalah. $t_{hitung} = 0,54$ dan $t_{tabel} = 4,303$.



Gambar 4.3 Kriteria Pengujian Uji t

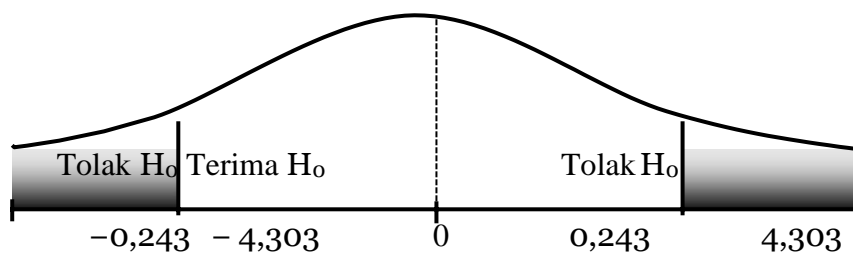
H_0 diterima jika $:-4,303 \leq t_{hitung} \leq 4,303$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $: t_{hitung} > 4,303$, atau $-t_{hitung} < -4,303$

Nilai t_{hitung} untuk variabel Dana alokasi umum adalah 0,054 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 4,303. Dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan pendapatan asli daerah sebesar $0.964 < 0.05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_1 ditolak (H_0 diterima) menunjukkan bahwa tidak pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kota Langsa.

2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai t untuk $n = 5-2= 3$ adalah 4,303. $t_{hitung} = 0,243$ dan $t_{tabel} = 4,303$



Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Uji t

H_0 diterima jika $-0,243 \leq t_{hitung} \leq 0,243$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > 4,303$, atau $-t_{hitung} < -4,303$

Nilai t_{hitung} untuk variabel Dana alokasi umum adalah 4,303 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 0,243. dengan

demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan dana alokasi umum sebesar $0,830 > 0.05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa pengaruh dan tidak signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kota Langsa.

2. Uji F (Uji Signifikan Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variable bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variable terikat (Y).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 22.0 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji F

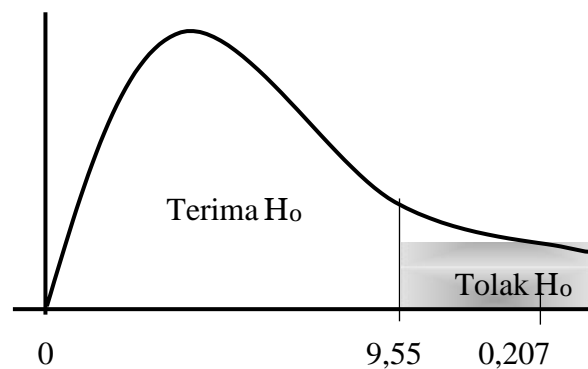
ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1970731791396214800 0000.000	2	98536589569810740000 00.000	.207	.828 ^b
	Residual	9499969038472042000 0000.000	2	47499845192360210000 000.000		
	Total	1147070082986825700 00000.000	4			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), DAU, PAD						

Sumber: SPSS versi 22.0

$$f_{tabel} = 5 - 2 - 1 = 3$$

$$f_{hitung} = 0,207 \text{ dan } f_{tabel} = 9,55$$

Kriteria pengambilan keputusan :



Gambar 4.5 Kurva Uji F

H_0 diterima jika : $-9,55 \leq f_{hitung} \leq 9,55$, untuk $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika : $f_{hitung} > 9,55$, atau $-f_{hitung} < -9,55$ untuk $\alpha = 5\%$

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai f_{hitung} sebesar 0,207 dengan tingkat signifikan sebesar 0,828. Sedangkan nilai f_{tabel} diketahui sebesar 9,55. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $f_{hitung} < f_{tabel}$ ($0,207 < 9,55$) artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kota Langsa.

3. Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Nilai R-square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengujian statistiknya :

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.414 ^a	.172	-.656	217944592023.66140
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD				
b. Dependent Variable: Belanja Daerah				

Sumber: SPSS Versi 22.00

$$D = R^2 \times 100\%$$

$$D = 0.656 \times 100\%$$

$$= 65,6\%$$

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari R square sebesar 0.656 yang berarti 65,6% dan hal ini menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah sebesar 65,6% untuk mempengaruhi variable belanja daerah. Selanjutnya selisih $100\% - 65,6\% = 34,4\%$. hal ini menunjukkan 34,4% tersebut adalah variabel lain yang tidak berkontribusi terhadap penelitian belanja daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kota Langsa, hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0,056 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 4,303. Dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,962 > 0,05$ artinya dari hasil tersebut H_0 ditolak menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa.

Secara teoritis seharusnya PAD memiliki pengaruh yang besar terhadap Belanja Daerah karena dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapata asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

PAD merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja daerah. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan public (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja daerah, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah.

Pertumbuhan belanja daerah merupakan salah satu usaha pemerintahankabupaten/kota untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Pertumbuhan belanja daerah merupakan ciri positif bahwa pemerintahanKabupaten/Kota telah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat. Dari hasil pengujian tersebut, maka pemerintah daerah di Kota Langsa masih perlu untuk menggali potensi daerah dalam meningkatkan pertambahan pendapatan di daerah. Dalam era otonomi, daerah dituntut untuk mencari

alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Friyani, 2017), (Rusmita, 2016), (Marzalita et al., 2014) dan (Sorongan, 2013) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah pada Kota Langsa hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel Dana Alokasi Umum adalah 0,243 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 4,303. Dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan Dana Alokasi Umum sebesar $0.830 < 0.05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa.

Ketika Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan, Belanja Daerah juga mengalami peningkatan. Tetapi besarnya peningkatan Dana Alokasi Umum tidak sebanding dengan peningkatan Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan.

Menurut PP No 55 Tahun 2005 Pasal 1 No 22 dan 23, tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Desentralisasi. Contoh nyata Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai biaya yang bersifat umum, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak hanya ditransfer untuk daerah tetapi juga digunakan untuk pos belanja pegawai dan untuk pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Firdayanti & Hidayat, 2019),(Rusmita, 2016), (Nur, 2015) dan (Sorongan, 2013) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa hasil uji hipotesis secara simultan bahwa nilai f_{hitung} sebesar 0,207 dengan tingkat signifikan sebesar 0,828. Sedangkan nilai f_{tabel} diketahui sebesar 9,55. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $f_{hitung} < f_{tabel}$ ($0,207 < 9,55$) artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

Hal ini menunjukkan pemerintah Kota Langsa masih tergantung oleh DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar. Sedangkan PAD didapatkan dari iuran langsung masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah Kota Langsa masih perlu untuk menggali potensi daerah dalam meningkatkan pertambahan pendapatan di daerah.

Menurut Kepmendagri Nomor. 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Dalam undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di danai dari atas beban APBN.

Menurut UU No 17 Tahun 2003 bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Menurut PP No 104 Tahun 2000 pasal 15 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana Alokasi Umum merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui transfer untuk membantu keuangan daerah.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kota Langsa
2. Secara parsial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue
3. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Langsa diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Belanja Daerah, untuk itu diperlukan metode perhitungan potensi yang sistematis dan rasional sehingga diperoleh PAD yang rill dimiliki daerah untuk membiayai belanja daerah.
2. Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja daerah. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya menguji

belanja yang terjadi, berangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi atau tidak ada dilakukan.

3. Masih terjadi adanya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah usaha yang dapat dilakukan meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, eksplotasi sumber daya alam skema pembentukan capital.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, Kiki Ninda & Handayani, N. (2016). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–16.
- Elizar Sinambela, F. S., & Eka Nurmala Sari. (2018). Analisis Struktur Apbd Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 1–9.
- Ferdian, Yuriko. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1–30.
- Firdayanti, F., & Hidayat, M. T. (2019). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 49–66.
- Friyani, R. (2017). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dandana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Edukasi*, 5(2), 101–104.
- Ikhsan, A., Muhyarsyah., Tanjung, H., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Ciptapustaka Media.
- Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, D. F. A. (2014). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2009 -2013. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 15(1), 1–7.
- Jati, B. D. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ecodunamika*, 3(1), 1–6.
- Jolianis. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pelangi*, 7(4), 47–60.
- Kuncoro, Mudrajad. (2011). Metode Kuantitatif. In 1(2nd Ed., P. 212)
- Kusumadewi, Diah Ayu & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Jaai*, 11(1), 1–14.
- Marzalita, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 3(3), 46–58.

- Mirani, Tumiwa, A.M.Koleangan, Rosalina, O. Niode, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Bitung Tahun 2003-2015. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 764–770.
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Sulawesi Selatan. *Assets*, 5(1), 78–88.
- Nurfajri & Faisal. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 2(1), 1–10.
- Pilat, Juddy Julian & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 06(01), 45–56.
- Putri, E. I., & Gunawan, B. (2018). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Perusahaan Property Dan Real Estate. *Seminar Nasional Dan The 6th Call For Syariah Paper*, 388–406.
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237–257.
- Saputri, Marissa Ayu & Muid, D. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012 Oleh Marissa Ayu Saputri, Dul Muid. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1–11.
- Sinambela, Elizar & Rizki Ana Pohan, K. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Rovinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–18.
- Sorongan, J. F. (2013). Analisis Hubungan Dau, Pad Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 171–180.
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. In 1 (18th Ed.). Alfabeta.
- Sujono, I. G. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Management Accounting*, 1–20.

Ubar Harahap, R. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 1–12.

TABEL II
NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t

α untuk uji dua pihak (<i>two tail test</i>)						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
α untuk uji satu pihak (<i>one tail test</i>)						
dk	0,25	0,10	0,005	0,025	0,01	0,005
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,486	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,165
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,178	2,681	3,055
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,691	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,690	1,341	1,753	2,132	2,623	2,947
16	0,689	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,688	1,333	1,743	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,740	2,101	2,552	2,878
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
25	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.35	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.25	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.98	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1711/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/4/2020

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/4/2020

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fitriy Octary
NPM : 1605170358
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Pemilihan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sebagai objek penelitian dikarenakan pertumbuhan ekonomi antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota tidak merata. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah setiap wilayah pun berbeda-beda. Pemerintah daerah cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam membangun sarana dan prasarana.

Rencana Judul : 1. analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota
2. Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD
3. Analisis alokasi dana desa

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintah Kota Langsa

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Fitriy Octary)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061 6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomer Agenda: 1711/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/4/2020

Nama Mahasiswa : Fitry Oetary
NPM : 1605170358
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 29/4/2020
Nama Dosen pembimbing*) : Sukma Lesmana, SE, M.Si (13 Juni 2020)

Judul Disemjui**)


Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi
Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Langsa

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing


(Sukma Lesmana, SE, M.Si)

Keterangan

*) Data oleh Perpustakaan Program Studi

**) Data oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, akan foto dan diposkan ke website ke-2 ke pada forum online "Updat Pengajaran Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaiikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

F	I	T	R	Y		O	E	T	A	R	Y								
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	6	0	5	1	7	0	3	5	8										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

L	A	N	G	S	A		2	1		J	A	N	U	A	R	I			
1	9	9	8																

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	A	L	A	N		E	K	A		S	U	R	Y	A					
K	O	M	P	L	E	K		R	O	Y	A	L		M	O	N	A	C	O

Tempat Penelitian :

K	A	N	T	O	R		B	P	K	D		K	O	T	A				
L	A	N	G	S	A														

Alamat Penelitian :

J	A	L	A	N		A	H	M	A	D		Y	A	N	I		N	O	
1	8		K	O	T	A		L	A	N	G	S	A						

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....Fitriani Saragih, SE, M.Si.....)

Wassalam
Pemohon

(.....Fitry Oetary.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Fitry Oetary
N.P.M : 1605170358
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Proposal : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA LANGSA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
12/08-2020	Dilatar Belakang masalah setelah tabel 1.1 wajib ada hasil penelitian terdahulu membuktikan DAU dan PAD mempengaruhi belanja daerah		
03/09-2020	1. Gambar 2.1 harus jelas yang mana menunjukkan hipotesis penelitian 2. Teknik pengumpulan data dokumentasi saja tidak pake observasi.		
11/09-2020	1. pada teknik analisis data jelaskan pakai software statistik apa dan versi berapa. 2. wajib mencantumkan referensi yang relevan dengan topik penelitian minimal 3 dosen akuntansi unmu serta wajib dikutip pada BAB-BAB sebelum daftar pustaka.		
16/9	ACC Seminar		

Pembimbing Proposal

SUKMA LESMANA, SE, M.Si

Medan, Agustus 2020
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 07 Oktober 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Fitry Octary*
 NPM : *1605170358*
 Tempat / Tgl. Lahir : *Langsa, 21 Januari 1998*
 Alamat Rumah : *Jalan Taud No. 126 Medan*
 Judul Proposal : *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Langsa*

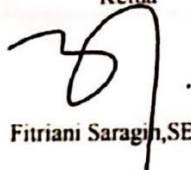
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
<i>Bab I</i>	<i>- Apa mampukah penelitian yang terkait dengan data, bagaimana kaitan PAD dan DAU terhadap belanja Daerah dalam data tsb. sehingga dari itu muncul fenomena masalah - PAD dan belanja daerah tidak mencapai target tapi masalahnya apa?</i>
<i>Bab II</i>
<i>Bab III</i>
<i>Lainnya</i>
<i>Kesimpulan</i>	<i>Perbaikan Minor</i> <i>Seminar Ulang</i> <i>Perbaikan Mayor</i>

Medan, 07 Oktober 2020

TIM SEMINAR


Ketua


Fitriani Saragin, SE, M.Si

Sekretaris


Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing


Sukma Lesmana, SE, M.Si

Pembanding


Dr. Irfan, SE, MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 07 Oktober 2020* menerangkan bahwa:

Nama : Fitry Oetary
NPM : 1605170358
Tempat / Tgl Lahir : Langsa, 21 Januari 1998
Alamat Rumah : Jalan Taud No. 126 Medan
Judul Proposal : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Langsa

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Sukma Lesmana, SE, M.Si*

Medan, 07 Oktober 2020

TIM SEMINAR

Ketda

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing

Sukma Lesmana, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE, MM

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 2593/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 29 April 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Fitri Octary
N P M : 1605170358
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Belanja Daerah pada Kota Langsa

Dosen Pembimbing : **Sukma Lesmana, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 September 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Muharram 1442 H
17 September 2020 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan

Dipindai dengan CamScanner



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1932/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 11 Dzul qa'dah 1441 H
03 Juli 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor BPKD kota Langsa
Jln. Ahmad Yani No. 18 Kota Langsa
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fitri Oetary
Npm : 1605170358
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Langsa

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertinggal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(B P K D)**

Jln. Ahmad Yani No. 18 A, Langsa Kota
Email : bpkd@langsakota.go.id
LANGSA

Langsa, 13 Juli 2020

Nomor : 892.4 / 4731 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Riset Pendahuluan.-

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU

di-
Tempat

Menindak lanjuti surat saudara nomor 1932/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 03 Juni 2020 M/11 Dzulqaidah 1441 H perihal Izin Riset Pendahuluan, bahwasanya Mahasiswa/i a.n. Fitry Oetary NPM 1605170358 telah selesai melaksanakan riset di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA



M. NASIR YACOB, SE
Pembina
Nip. 19720119 199303 1 005